

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMK NEGERI 1 BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :  
Lia Rachmahnia  
(172020100004)

Dosen Pembimbing : Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Progam Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023

# Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses layanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun). Bantuan diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah.

Pintar (Program Indonesia PIP) diamanatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendasar pada Instruksi Presiden yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), serta disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Indonesia Pintar (PIP),



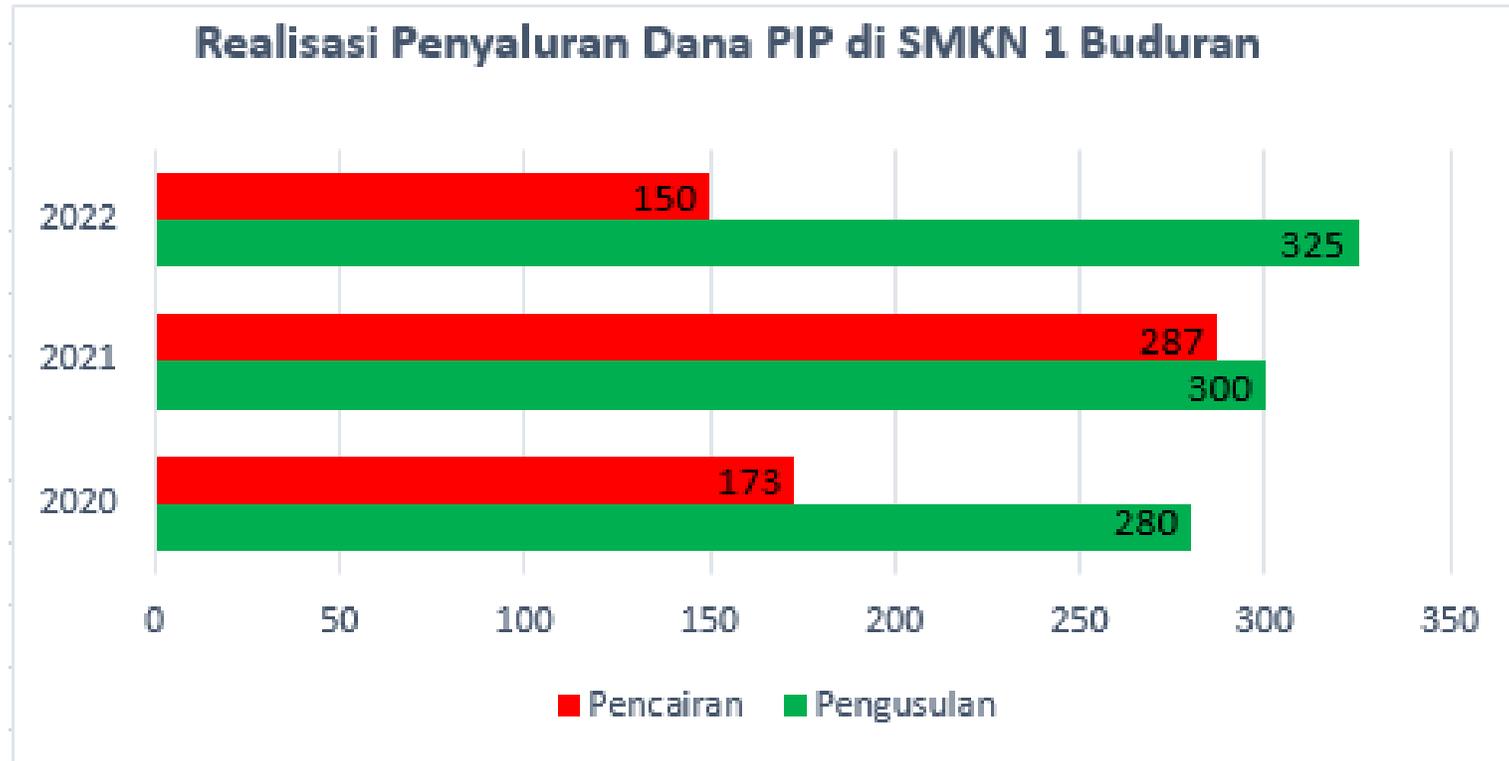
dengan maksud dapat menjamin akses pelayanan pendidikan supaya dapat dirasakan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kendala ekonomi, melalui pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak usia sekolah, supaya dapat dirasakan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kendala ekonomi, melalui pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak usia sekolah tujuan menjamin akses pelayanan pendidikan.

### **Kendala Program Indonesia Pintar di SMKN 1 Buduran :**

1. Proses penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) harusnya disesuaikan dengan Tahun Ajaran bukan sesuai tahun anggaran. Jadi kendalanya terjadi pada siswa kelas XII yang telah lulus sekolah namun dana PIP baru proses pencairan.
2. Proses pembayaran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak tepat waktu.
3. Belum optimalnya proses penyaringan bagi peserta yang mengajukan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)



SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo merupakan salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Program Indonesia Pintar (PIP). Berikut realisasi penyaluran dana PIP di SMKN 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo :



# METODE PENELITIAN

## JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif Deskriptif

### FOKUS PENELITIAN

Pada penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala pada proses Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo.



### PENDEKATAN TEORI EDWARD III Implementasi Kebijakan :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.



**LOKASI PENELITIAN :**  
SMK NEGERI 1 BUDURAN,  
KABUPATEN SIDOARJO



**TEKNIK PENGUMPULAN  
DATA :**

- Observasi
- Wawancara
- Studi Pustaka



**INFORMAN**

Kepala SMKN 1 Buduran, Staf  
Administrasi PIP, Siswa

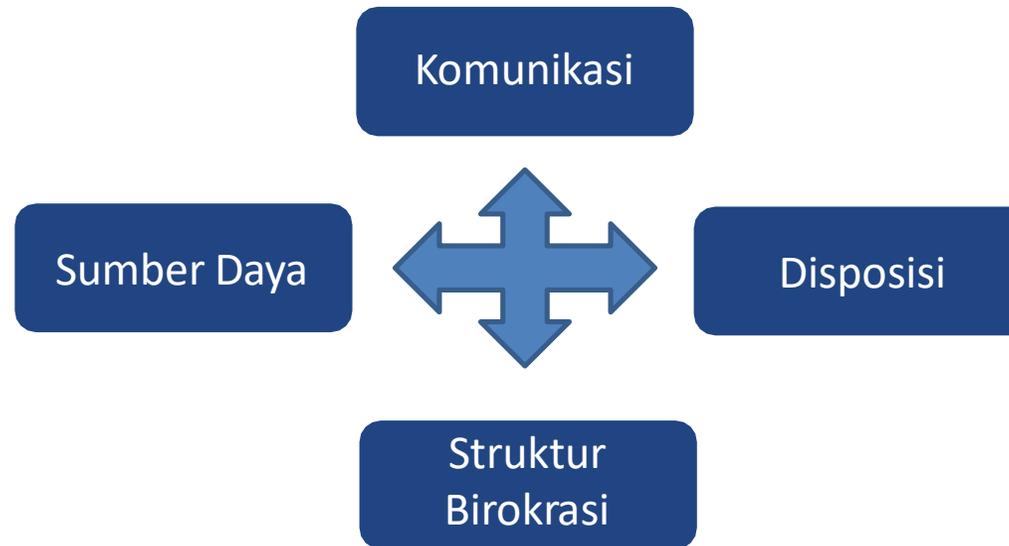


**SUMBER DATA :**

- Data Primer
- Data Sekunder

# Hasil dan Pembahasan

- Analisa yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan program Indonesia pintar di SMKN 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo merujuk kepada model yang dikembangkan oleh Edward III yang terdiri dari empat indikator



# Hasil dan Pembahasan

## Komunikasi

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana (SMK Negeri 1 Buduran) sebelumnya menginformasikan tentang persyaratan pengusulan bantuan Program Indonesia Pintar kepada semua siswa melalui guru BK dan wali kelas, pihak pelaksana sekolah berkomunikasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) mengenai informasi nama-nama penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Dan siswa juga dapat mengecek melalui web resmi <https://pip.kemdikbud.go.id>. Pihak sekolah kembali menginformasikan bekerjasama dengan guru BK menyampaikan kepada siswa yang mendapatkan bantuan PIP untuk segera melakukan pencairan dana dan menghubungi pihak penyalur (Bank BNI). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal penyampaian informasi terkait nama-nama penerima bantuan PIP kepada siswa dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan siswa penerima bantuan PIP di sekolah dari yang diusulkan sebagian besar sudah menerima bantuan PIP. Walaupun ada beberapa yang terkendala karena ketinggalan informasi saat siswa yang bersangkutan melaksanakan magang di Industri.

## Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pelaksana kebijakan. Sumber daya di SMK Negeri 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung terhadap Implementasi Program Indonesia Pintar sudah terstruktur dengan baik mulai dari Kepala Sekolah, Guru BK, Operator Dapodik, dan siswa penerima PIP. Adapun sumber daya non manusia berupa sumber daya keuangan tidak menjadi masalah karena PIP merupakan program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan non manusia terkait Implementasi Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran sudah berjalan dengan baik, pihak sekolah sudah melaksanakannya dengan maksimal.

# Pembahasan

## **Disposisi**

Menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Apabila para pelaksana ingin mengimplementasi berjalan efektif dan efisien maka harus memahami dan bersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, semua pelaksana Program Indonesia Pintar yang terkait benar-benar memahami dan menerima kebijakan tersebut sehingga mampu melaksanakan implementasi kebijakan PIP dengan maksimal, dengan memberikan informasi kepada orang tua dan siswa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa disposisi pada Implementasi Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran sudah berjalan dengan baik dilihat dari bagaimana pihak pelaksana memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal.

## **Struktur Birokrasi**

Merupakan salah satu unsur dalam penerapan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan implementasi yang berkaitan dengan proses pencairan dana, yang mana dalam proses pencairan tersebut melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yaitu pihak sekolah dan pihak penyalur (BNI). Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa para penerima bantuan Program Indonesia Pintar tidak diprioritaskan oleh pihak Bank BNI sehingga mereka tetap harus antri lama bersama para nasabah yang lain. Selain itu juga terdapat data yang tidak sinkron dari pihak sekolah dan pihak BNI yang menyebabkan penerima harus kembali untuk mengurus datanya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Birokrasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

# Pembahasan

## **Kendala Penerapan Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SMK Negeri 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo**

Secara keseluruhan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam proses pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Komunikasi kebijakan berkaitan dengan kerjasama antara lembaga penyalur dengan sekolah tentang pengambilan dana. Terkadang peserta didik sudah datang ke bank tetapi dana belum bisa dicairkan. Informasi mengenai periode pencairan dana juga tidak pasti, sehingga peserta didik tidak mengetahui kapan dana dapat diambil. Sekolah mengalami kesulitan tentang validitas data, sekolah sudah mengusulkan tetapi peserta didik tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima PIP sementara peserta didik yang diusulkan lewat jalur fraksi (partai) ditetapkan sebagai penerima PIP. Untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi beberapa alternatif yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut antara lain Operator Dapodik bekerjasama dengan guru BK di SMK Negeri 1 Buduran mencari informasi sendiri terkait pedoman pelaksanaan PIP, terkait validitas data, sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk memperoleh bantuan PIP salah satunya dengan penyampaian informasi dan pengumpulan data sewaktu awal penerimaan siswa baru.

# Temuan Penting

Dalam penelitian yang dilakukan pada Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo, Sekolah mengalami kesulitan tentang validitas data, sekolah sudah mengusulkan tetapi peserta didik tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Program Indonesia Pintar sementara peserta didik yang diusulkan lewat jalur fraksi (partai) ditetapkan sebagai penerima Program Indonesia Pintar.

# Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat terpublikasi dengan baik sehingga diluar sana terutama peserta didik penerima bantuan Program Indonesia Pintar diharapkan dapat mengetahui tentang apapun saja persyaratan pengusulan bantuan Program Indonesia Pintar yang harus dipenuhi.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan melalui wawancara dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa: (1) Komunikasi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar jika dilihat dari proses penyampaian informasi terkait nama penerima bantuan PIP masih kurang efektif, tetapi jika dilihat dari proses penyampaian informasi melalui sosialisasi tentang tujuan dan sasaran penggunaan dana PIP sudah berjalan dengan baik. (2) Sumber Daya terkait Implementasi Program Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal. (3) Disposisi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik dilihat dari pihak pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal. (4) Struktur Birokrasi terkait Implementasi Program Indonesia Pintar belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana didalamnya melibatkan lebih dari satu struktur birokrasi yang masing-masing pihak memiliki standar operasional berbeda.

.

# TERIMA KASIH

